



**KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Carlo B. Tewu**
Jabatan : **Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat**

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : **Wiranto**
Jabatan : **Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan**

Selaku atasan pihak pertama

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan dan akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini serta mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

WIRANTO

Jakarta, Januari 2019

Pihak Pertama,

CARLO B. TEWU

**FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN**

Unit Organisasi : Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
Tahun Anggaran : 2019

Sasaran Strategis (1)	Indikator Kinerja (2)	Target (3)
Meningkatnya koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian di bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	1. Prosentase Rekomendasi yang selesai ditindaklanjuti	55%
	2. Prosentase penyelesaian tindak pidana (Pemilu, bidang Migas, bidang kehutanan, bidang pertambangan, bidang Cyber terkait Pemilu)	55%
	3. Prosentase : a. penurunan konflik sosial b. penurunan angka kecelakaan transportasi c. penguatan sistem deteksi dini (Tiga Pilar) d. penguatan siaga darurat untuk mencegah terjadinya tanggap darurat	10%
	4. Prosentase peningkatan penetapan status Obvitnas oleh K/L	10%
Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi gugus tugas Gerakan Indonesia Tertib (GIT) dalam mensosialisasikan Program Gerakan Indonesia Tertib (GIT)	1. Prosentase terbentuknya gugus tugas Gerakan Indonesia Tertib (GIT) di daerah	60%
	2. Prosentase pelaksanaan Gerakan Indonesia Tertib (GIT)	100%
Terwujudnya daya dukung manajemen unit organisasi yang berkualitas	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja	BB
	2. Nilai atas evaluasi pelaksanaan RKA-K/L	80

Jumlah Anggaran Program :

Peningkatan Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Rp. 19.700.000.000,-
(sembilan belas milyar tujuh ratus juta rupiah)

Menko Polhukam,



WIRANTO

Jakarta, Januari 2019

**Deputi Bidang Koordinasi Keamanan
dan Ketertiban Masyarakat,**



CARLO B. TEWU